



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DR. WINARTO HARYADI, M.SI
2. Jabatan : SEKRETARIS DEPARTEMEN KIMIA
3. NHK : 812998

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.700.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 89 m²/36 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m²/36 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 137 m²/70 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 195 m²/70 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 444.500.000

1. MOBIL, SUZUKI XL7 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
2. MOBIL, TOYOTA RAIZE Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
3. MOTOR, YAMAHA FILANO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
4. LAINNYA, UNITED (SEPEDA) SEPEDA MTB DETROIT 7 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
5. LAINNYA, TREK (SEPEDA) SEPEDA Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000



6. LAINNYA, XIAOMI HIMO C20 SEPEDA LISTRIK Tahun 2021,
HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

| | | |
|--|-----|----------------------|
| C. HARTA BERGERAK LAINNYA | Rp. | 185.684.668 |
| D. SURAT BERHARGA | Rp. | ---- |
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 516.656.591 |
| F. HARTA LAINNYA | Rp. | ---- |
| Sub Total | Rp. | 3.846.841.259 |
| III. HUTANG | Rp. | 522.685.435 |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | Rp. | 3.324.155.824 |

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.